

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	20 Orang	100.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Tranformasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah		-	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	10 Orang	50.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Tranformasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah		-	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
181.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						2.822.000.000,00							2.822.000.000,00	
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan						2.822.000.000,00							2.822.000.000,00	
			1.Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	80 Persentase		55 Persentase	65 Persentase	2.822.000.000,00						70 Persentase	2.822.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						2.772.000.000,00					-		2.772.000.000,00	
		Terbangunnya kebijakan dan program kewaspadaan nasional yang sistematis, disertai dengan penguatan koordinasi lintas lembaga, pemantauan dan pengawasan yang terarah, serta forum komunikasi daerah yang aktif, sehingga kapasitas penanganan konflik sosial semakin berkualitas, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian secara damai.						2.772.000.000,00					-		2.772.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.680.000.000,00						12 Dokumen	1.680.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.092.000.000,00						12 Dokumen	1.092.000.000,00	
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						1.092.000.000,00							1.092.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	1.092.000.000,00	Provinsi Maluku Utara Kab. Pulau Taliabu Kecamatan Taliabu Barat Desa Bobong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Tranformasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah		12 Dokumen	1.092.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						1.680.000.000,00							1.680.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	1.680.000.000,00	Provinsi Maluku Utara Kab. Pulau Taliabu Kecamatan Taliabu Barat Desa Bobong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Tranformasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah		12 Dokumen	1.680.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Terbangunnya kebijakan dan program kewaspadaan nasional yang sistematis, disertai dengan penguatan koordinasi lintas lembaga, pemantauan dan pengawasan yang terarah, serta forum komunikasi daerah yang aktif, sehingga kapasitas penanganan konflik sosial semakin berkualitas, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian secara damai.						100.000.000,00					-		100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	24 Orang	50.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Tranformasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah		-	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	24 Orang	50.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Tranformasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah		-	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							510.706.855.000,00							237.119.982.210,00	



RKPD 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN
PULAU TALIBU

BAB VI **KINERJA** **PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAH DAERAH**

RKPD 2027
KABUPATEN PULAU TALIBU



TALIABU MAJU,
SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu komponen penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029. Penetapan kinerja tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu selama masa jabatan. Kinerja pembangunan daerah pada dasarnya merupakan hasil kumulatif dari pelaksanaan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan selama periode RPJMD.

Pencapaian kinerja pembangunan daerah ditunjukkan melalui akumulasi capaian indikator hasil (outcome) dari program-program pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun, serta indikator-indikator pembangunan yang bersifat mandiri dan strategis. Akumulasi capaian tersebut pada akhirnya akan menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan kondisi pembangunan yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Dengan demikian, penetapan kinerja bukan hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya pembangunan daerah diarahkan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah, indikator kinerja merupakan representasi kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk menilai capaian pembangunan secara objektif. Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis hubungan sebab-akibat antara pelaksanaan program pembangunan dengan perubahan kondisi pembangunan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, suatu indikator kinerja daerah dapat dibentuk dari pengaruh satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) yang secara bersama-sama berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Sebagai contoh, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak hanya dipengaruhi oleh satu program pembangunan tertentu, tetapi merupakan hasil sinergi dari berbagai program pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Demikian pula penurunan tingkat kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh program bantuan sosial, tetapi juga oleh peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, indikator kinerja daerah mencerminkan hasil pembangunan yang bersifat multidimensional dan lintas sektor.

Indikator kinerja daerah berfungsi sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk angka, indeks, rasio, persentase, maupun satuan statistik lainnya yang menggambarkan perkembangan pembangunan daerah. Sementara secara kualitatif, indikator kinerja dapat menunjukkan perubahan kualitas pelayanan publik, kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas lingkungan hidup, tingkat kepuasan masyarakat, dan berbagai aspek pembangunan lainnya yang tidak selalu dapat diukur melalui angka semata.

Keberadaan indikator kinerja daerah menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai instrumen pengendalian pembangunan. Melalui indikator yang terukur, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan pelaksanaan pembangunan secara berkala, mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi, serta mengambil langkah-langkah korektif apabila terdapat penyimpangan dari target

yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, indikator kinerja berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system) yang membantu pemerintah daerah menjaga agar arah pembangunan tetap berada pada jalur yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.

Indikator kinerja daerah pada dasarnya merupakan refleksi dari capaian indikator kinerja program yang bersifat hasil (outcome) dan indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (output). Dalam kerangka manajemen kinerja pemerintahan, terdapat hubungan logis antara input, proses, output, outcome, benefit, dan impact. Input berupa sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, seperti anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Input tersebut diolah melalui berbagai proses pelaksanaan program dan kegiatan sehingga menghasilkan output atau keluaran. Output yang dihasilkan kemudian akan memberikan outcome atau hasil yang menunjukkan perubahan kondisi pada kelompok sasaran. Selanjutnya outcome akan menghasilkan manfaat (benefit) yang lebih luas dan pada akhirnya memberikan dampak (impact) terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029, pengukuran outcome menjadi lebih penting dibandingkan sekadar pengukuran output. Hal ini karena outcome mampu menggambarkan efektivitas program pembangunan dalam menghasilkan perubahan yang nyata bagi masyarakat. Sebagai contoh, pembangunan gedung sekolah merupakan output, sedangkan meningkatnya angka partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan merupakan outcome yang ingin dicapai. Demikian pula pembangunan puskesmas merupakan output, sementara meningkatnya derajat kesehatan masyarakat merupakan outcome yang menjadi tujuan pembangunan.

Penetapan indikator kinerja juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pengukuran kinerja yang baik. Indikator yang digunakan harus mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya, relevan dengan tujuan pembangunan, mudah dipahami, dapat diukur secara objektif, serta memiliki sumber data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, indikator dan target kinerja dalam RPJMD disusun dengan mengacu pada prinsip Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound, dan Continuously Improve (SMART-C).

Prinsip Specific mengharuskan indikator memiliki definisi yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Prinsip Measurable menuntut agar indikator dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip Achievable menekankan bahwa target yang ditetapkan harus realistis dan dapat dicapai sesuai kapasitas daerah. Prinsip Relevant mengharuskan indikator memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai. Prinsip Time Bound menunjukkan bahwa target harus memiliki batas waktu pencapaian yang jelas. Sedangkan prinsip Continuously Improve menegaskan bahwa indikator harus mampu mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Pencapaian indikator kinerja daerah merupakan cerminan keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, indikator kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas publik. Melalui indikator kinerja, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pemerintah daerah berhasil melaksanakan mandat pembangunan yang diberikan serta menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara objektif.

Dalam era otonomi daerah, kebutuhan akan indikator kinerja yang komprehensif menjadi semakin penting karena pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Kinerja pemerintah daerah harus mampu mencerminkan keberhasilan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun urusan pilihan yang menjadi potensi unggulan daerah. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan daerah harus mampu menggambarkan kemajuan daerah secara menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup, infrastruktur, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, indikator kinerja daerah diarahkan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan lima prioritas pembangunan daerah, yaitu Pelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan

Bencana, Pembangunan Infrastruktur yang Mendorong Produktivitas Ekonomi Wilayah, Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penguatan Pertumbuhan, Pemerataan Ekonomi dan Penanganan Kemiskinan, serta Peningkatan Transformasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah. Oleh karena itu, indikator-indikator utama yang digunakan antara lain meliputi Indeks Pembangunan Manusia, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Gini, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, indeks reformasi birokrasi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta indikator-indikator strategis lainnya yang mencerminkan kemajuan pembangunan daerah.

Perumusan indikator kinerja utama Bupati Pulau Taliabu dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai indikator yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), indikator pembangunan nasional, indikator pembangunan Provinsi Maluku Utara, serta indikator strategis daerah yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu. Seluruh indikator tersebut dirumuskan dalam bentuk indikator makro pembangunan daerah yang terukur dan kuantitatif sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengendalian, evaluasi, monitoring, dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Dengan demikian, penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029 merupakan instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan, tetapi juga sebagai sarana pengendalian, evaluasi, peningkatan akuntabilitas, dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan pencapaian indikator-indikator tersebut akan menjadi bukti nyata keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam mewujudkan visi pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Pulau Taliabu

No	Indikator Kinerja Daerah / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	6,20
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen (%)	1,45
3	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,56
4	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp.000	68.500
5	Tingkat Inflasi	Persen (%)	2,50 ± 1
6	Indeks Gini Rasio	Indeks	0,300
7	Angka Kemiskinan	Persen (%)	6,50
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	3,20
9	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,50
10	Angka Stunting	Persen (%)	12,50
11	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,90
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,50
13	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Rp.000/Orang/Tahun	12.850

14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74,50
----	----------------------------------	--------	-------

Target kinerja daerah Tahun 2027 merupakan gambaran kondisi pembangunan yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu sebagai hasil pelaksanaan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selama tahun perencanaan. Penetapan target tersebut disusun dengan mempertimbangkan capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya, arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029, target pembangunan nasional dan Provinsi Maluku Utara, kapasitas fiskal daerah, serta potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi daerah.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,20 persen

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor-sektor unggulan daerah, terutama sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, konstruksi, dan jasa. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan didukung oleh pembangunan infrastruktur yang semakin memadai, peningkatan investasi daerah, pengembangan UMKM, serta peningkatan produktivitas masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

2. Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,45 persen

Target laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,45 persen menunjukkan kondisi pertumbuhan penduduk yang terkendali dan seimbang dengan kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan dasar, lapangan kerja, dan infrastruktur publik. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dilakukan melalui peningkatan kualitas program kependudukan dan keluarga berencana, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi, serta penguatan pembangunan keluarga yang berkualitas.

3. Indeks Modal Manusia sebesar 0,56

Target Indeks Modal Manusia sebesar 0,56 menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan peningkatan keterampilan masyarakat. Indeks ini menggambarkan kemampuan penduduk untuk menjadi sumber daya yang produktif dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan daerah. Peningkatan indeks modal manusia menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. PDRB Per Kapita (ADHB) sebesar Rp68.500.000

Target Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp68,5 juta per penduduk menunjukkan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dan nilai tambah yang dihasilkan oleh perekonomian daerah. Kenaikan PDRB per kapita diharapkan berasal dari peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, meningkatnya investasi, berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya nilai tambah komoditas lokal. Peningkatan indikator ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.

5. Tingkat Inflasi sebesar 2,5 ± 1 persen

Target inflasi sebesar 2,5 persen dengan rentang pengendalian ±1 persen ditetapkan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di daerah. Inflasi yang terkendali sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),

peningkatan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, penguatan ketahanan pangan daerah, serta pemantauan harga komoditas strategis secara berkala.

6. Indeks Gini Rasio sebesar 0,300

Target Gini Rasio sebesar 0,300 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Nilai tersebut menggambarkan tingkat ketimpangan yang relatif rendah dan mencerminkan bahwa manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara lebih merata. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah.

7. Angka Kemiskinan sebesar 6,50 persen

Target penurunan angka kemiskinan menjadi 6,50 persen merupakan salah satu sasaran utama pembangunan daerah. Penurunan kemiskinan akan dicapai melalui peningkatan kesempatan kerja, pengembangan usaha ekonomi produktif, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Target ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,20 persen

Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,20 persen menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Penurunan tingkat pengangguran diharapkan melalui pengembangan sektor ekonomi produktif, peningkatan investasi, pelatihan keterampilan tenaga kerja, penguatan kewirausahaan, serta pengembangan UMKM dan sektor unggulan daerah yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.

9. Usia Harapan Hidup sebesar 69,50 Tahun

Target usia harapan hidup sebesar 69,50 tahun menunjukkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Pencapaian target ini didukung oleh peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan cakupan imunisasi, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan status gizi masyarakat, serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Usia harapan hidup yang lebih tinggi mencerminkan meningkatnya kualitas hidup masyarakat secara umum.

10. Angka Stunting sebesar 12,50 persen

Target prevalensi stunting sebesar 12,50 persen menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam mempercepat penurunan stunting sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Penurunan stunting dilakukan melalui intervensi spesifik dan sensitif yang mencakup peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, penyediaan air bersih dan sanitasi, edukasi pola asuh anak, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting.

11. Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,90 Tahun

Target rata-rata lama sekolah sebesar 8,90 tahun mencerminkan peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal. Peningkatan indikator ini dilakukan melalui perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu layanan pendidikan, pengurangan angka putus sekolah, pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Taliabu.

12. Harapan Lama Sekolah sebesar 13,50 Tahun

Target harapan lama sekolah sebesar 13,50 tahun menunjukkan peluang yang semakin besar bagi anak-anak usia sekolah untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Peningkatan indikator ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan yang lebih merata, berkualitas, dan terjangkau sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

13. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan sebesar Rp12.850.000 per Orang per Tahun

Target pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar Rp12,85 juta per orang per tahun menunjukkan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Peningkatan indikator ini diharapkan terjadi seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, bertambahnya kesempatan kerja, meningkatnya produktivitas ekonomi, serta terkendalinya tingkat inflasi daerah.

14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 74,50

Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 74,50 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Pencapaian target ini dilakukan melalui pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan sampah yang lebih baik, konservasi sumber daya alam, perlindungan kawasan hutan dan pesisir, rehabilitasi lahan kritis, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Indeks ini juga mendukung Prioritas Daerah yaitu Pelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana sebagai salah satu fokus utama pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027.

Secara keseluruhan, target-target kinerja tersebut menggambarkan arah pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Target-target tersebut juga menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029. Indikator Kinerja Utama menjadi ukuran kinerja yang bersifat strategis, terukur, dan berorientasi hasil (outcome), sehingga mampu menggambarkan dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

Penyusunan IKU Tahun 2027 dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara, karakteristik daerah kepulauan, potensi unggulan daerah, serta isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Pulau Taliabu. Indikator-indikator tersebut mencakup aspek pembangunan manusia, kesehatan, pendidikan, tata kelola pemerintahan, infrastruktur, ekonomi, lingkungan hidup, ketahanan sosial, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Penetapan target kinerja tahun 2027 diarahkan untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pembangunan wilayah, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan lingkungan hidup, serta peningkatan daya saing daerah. Selain itu, indikator kinerja utama juga berfungsi sebagai alat pengendalian pembangunan, dasar evaluasi kinerja perangkat daerah, serta instrumen akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi.

Adapun Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pulau Taliabu

No	Indikator Kinerja Daerah / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2027
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,50
2	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	120
3	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,56
4	Rata-Rata Nilai Asesmen Nasional – Literasi Membaca	Nilai	68,00
5	Rata-Rata Nilai Asesmen Nasional – Numerasi	Nilai	65,00
6	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,50
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	72,00
8	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen (%)	1,20
9	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,20
10	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	70,00
11	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	Persen (%)	72,00
12	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen (%)	95,00
13	Rumah Tangga Layak Huni	Persen (%)	82,00
14	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum	Persen (%)	90,00
15	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen (%)	78,00
16	Tingkat Kemiskinan	Persen (%)	6,50
17	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen (%)	10,50
18	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen (%)	3,20
19	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	Persen (%)	2,50
20	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen (%)	25,00
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen (%)	63,00
22	Proporsi Industri Kecil dan Menengah Tingkat Kabupaten	Persen (%)	98,00
23	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen (%)	3,50

24	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen (%)	2,50
25	Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	6,20
26	Rasio Gini	Indeks	0,300
27	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen (%)	55,00
28	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen (%)	7,50
29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	74,50
30	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen (%)	65,00
31	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	118,00
32	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	78,00
33	Angka Kriminalitas	Per 100.000 penduduk	120
34	Pertumbuhan PDRB Perikanan	Persen (%)	7,50
35	Peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen (%)	3,50

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 merupakan kondisi pembangunan yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu sebagai hasil pelaksanaan pembangunan selama tahun perencanaan. Setiap indikator mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

1. Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 69,50 Tahun

Target ini menunjukkan rata-rata perkiraan lama hidup penduduk sejak lahir apabila pola mortalitas yang berlaku pada tahun berjalan tetap berlangsung sepanjang hidupnya. Peningkatan UHH mencerminkan membaiknya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penurunan angka kematian bayi, peningkatan cakupan imunisasi, perbaikan status gizi, serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

2. Angka Kematian Ibu sebesar 120 per 100.000 Kelahiran Hidup

Target ini menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam menurunkan risiko kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Penurunan AKI dilakukan melalui peningkatan cakupan pemeriksaan kehamilan, persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar dan komprehensif, penguatan sistem rujukan, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

3. Indeks Modal Manusia sebesar 0,56%

Indeks ini mengukur kualitas sumber daya manusia berdasarkan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi. Peningkatan indeks modal manusia mencerminkan keberhasilan investasi

pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang berkontribusi terhadap peningkatan daya saing daerah.

4. Rata-Rata Nilai Asesmen Nasional Literasi Membaca sebesar 68%

Target ini menunjukkan peningkatan kemampuan peserta didik dalam memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Pencapaian target dilakukan melalui peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, penyediaan sarana pendidikan, serta penguatan budaya literasi di sekolah.

5. Rata-Rata Nilai Asesmen Nasional Numerasi sebesar 65%

Target numerasi menggambarkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Peningkatan nilai numerasi diharapkan melalui perbaikan kualitas pembelajaran matematika, peningkatan kompetensi guru, dan penguatan pendekatan pembelajaran berbasis pemecahan masalah.

6. Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 13,50 Tahun

Target ini menunjukkan harapan lama pendidikan formal yang dapat ditempuh oleh anak usia sekolah. Peningkatan indikator ini mencerminkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan lanjutan sehingga kualitas sumber daya manusia dapat terus meningkat.

7. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 72,00%

Target ini menunjukkan tingkat kematangan reformasi birokrasi yang mencakup tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, manajemen SDM aparatur, pelayanan publik, serta digitalisasi pemerintahan. Nilai tersebut mencerminkan birokrasi yang semakin efektif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan.

8. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB sebesar 1,20%

Target ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah. Peningkatan rasio menunjukkan semakin baiknya kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan secara mandiri.

9. Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,20%

Target ini mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Peningkatan nilai indeks menunjukkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan, responsif, dan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

10. Indeks Pembangunan Infrastruktur sebesar 70,00%

Target ini menunjukkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar daerah, termasuk jalan, jembatan, telekomunikasi, perumahan, air minum, dan sanitasi. Infrastruktur yang lebih baik akan mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat.

11. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik sebesar 72%

Target ini menunjukkan peningkatan kualitas jaringan jalan kabupaten yang mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan publik dan ekonomi.

12. Cakupan Layanan Telekomunikasi sebesar 95%

Target ini menggambarkan peningkatan akses masyarakat terhadap jaringan telekomunikasi dan internet sebagai bagian dari transformasi digital daerah, pengembangan ekonomi digital, dan pemerataan akses informasi.

13. Rumah Tangga Layak Huni sebesar 82%

Target ini menunjukkan peningkatan kualitas hunian masyarakat yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan ruang, sanitasi, dan kesehatan lingkungan.

14. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum sebesar 90%

Target ini menggambarkan peningkatan pelayanan air minum yang aman dan layak bagi masyarakat perkotaan guna mendukung kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup.

15. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman sebesar 78%

Target ini menunjukkan peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang aman guna mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

16. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,50%

Target ini mencerminkan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlindungan sosial, dan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar.

17. Rasio PDRB Industri Pengolahan sebesar 10,50%

Target ini menunjukkan peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah melalui pengembangan hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan komoditas unggulan lainnya.

18. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 3,20%

Target ini menggambarkan perkembangan sektor pariwisata dan jasa pendukung yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.

19. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif sebesar 2,50%

Target ini menunjukkan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah melalui pengembangan usaha berbasis kreativitas, budaya lokal, dan inovasi masyarakat.

20. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal sebesar 25 %

Target ini mencerminkan peningkatan inklusivitas pembangunan melalui perluasan kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja formal.

21. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan sebesar 63%

Target ini menunjukkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif yang mencerminkan kesetaraan gender dalam pembangunan ekonomi daerah.

22. Proporsi Industri Kecil dan Menengah sebesar 98%

Target ini menunjukkan dominasi dan penguatan sektor Industri Kecil dan Menengah sebagai penggerak utama ekonomi lokal dan pencipta lapangan kerja masyarakat.

23. Rasio Kewirausahaan Daerah sebesar 3,50%

Target ini menggambarkan peningkatan jumlah pelaku usaha baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan inovasi, dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

24. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB sebesar 2,50%

Target ini menunjukkan peningkatan kontribusi koperasi dalam perekonomian daerah melalui penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, dan pengembangan usaha anggota koperasi.

25. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,20%

Target ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang didorong oleh sektor perikanan, pertanian, perkebunan, perdagangan, konstruksi, dan jasa sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

26. Rasio Gini sebesar 0,300%

Target ini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif rendah sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

27. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 55%

Target ini mencerminkan peningkatan perlindungan sosial bagi tenaga kerja melalui perluasan kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

28. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan sebesar 7,50%

Target ini menunjukkan upaya peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan status gizi masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi.

29. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 74,50%

Target ini menunjukkan peningkatan efektivitas pengelolaan sampah melalui pengurangan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah secara berkelanjutan.

30. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah sebesar 65%

Target ini menggambarkan upaya penurunan tingkat risiko bencana melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, sistem peringatan dini, dan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana.

31. Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 118%

Target ini menunjukkan peningkatan kualitas demokrasi daerah yang ditandai oleh partisipasi masyarakat, kebebasan sipil, efektivitas lembaga demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

32. Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 78%

Target ini menunjukkan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan koordinasi keamanan, pencegahan tindak kriminal, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

33. Angka Kriminalitas sebesar 120 per 100.000 Penduduk

Target ini menunjukkan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan koordinasi keamanan, pencegahan tindak kriminal, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

34. Pertumbuhan PDRB Perikanan sebesar 7,50%

Target ini mencerminkan penguatan sektor perikanan sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Pulau Taliabu melalui peningkatan produksi, pengolahan hasil perikanan, pemasaran, dan kesejahteraan nelayan.

35. Peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 3,50%

Target ini menunjukkan peningkatan tingkat kesejahteraan nelayan yang tercermin dari kemampuan pendapatan nelayan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dan biaya produksi. Peningkatan NTN diharapkan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi usaha perikanan, stabilitas harga hasil tangkapan, serta dukungan sarana dan prasarana perikanan.

Penetapan Indikator Kinerja Program Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 disusun sebagai instrumen utama dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan akuntabel. Indikator kinerja ini dirumuskan berdasarkan prioritas pembangunan daerah, sasaran RPJMD, serta keterkaitan dengan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Penyusunan indikator kinerja tahun 2027 juga mempertimbangkan kondisi capaian tahun sebelumnya, kapasitas fiskal daerah, serta tantangan pembangunan yang dihadapi, termasuk aspek geografis, pemerataan layanan, dan kualitas sumber daya manusia aparatur. Dengan demikian, target yang ditetapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga realistis dan adaptif terhadap kemampuan riil daerah dalam melaksanakannya.

Melalui penetapan indikator kinerja ini, diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah. Selain itu, indikator ini juga menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2027 secara berkelanjutan.

Berikut tabel Penetapan Indikator Kinerja Program Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027.

Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Program Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun

No	Urusan/Program RPJMD	Indikator	Target Dan Satuan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	URUSAN PENDIDIKAN		
1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	16%
1.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 16–18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	85%
1.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 14–18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	75%
1.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum local	100%
1.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks pemerataan guru	0,70
1.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	75%

1.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan atau diperbarui	100%
1.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	100%
2. URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN			
2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	92%
2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	95%
2.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu (AKI)	3
2.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	14%
2.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	90%
2.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	90%
2.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	95%
2.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	75%
2.06	PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi	100%
2.06	PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	Penerbitan izin fasilitas layanan kesehatan tingkat daerah rumah sakit kelas C, D dan Akreditasi	100%
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			
3.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	85%

3.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan permukiman rawan banjir	150 ha
3.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	25 ha
3.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum	7.500 KK/Rumah
3.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN NASIONAL	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPS regional	60%
3.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase peningkatan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dan aman	6.800 KK/Rumah
3.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan drainase dalam kondisi baik	8,50 Km
3.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	65%
3.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Bangunan gedung dalam kondisi baik	25 unit
3.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	60%
3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan	120 Km
3.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	55%
3.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang	3 kasus
4.	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
4.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	85%
4.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	15%
4.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	3%

4.04	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase luas kawasan kumuh 10–15 Ha yang ditangani	50%
4.04	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	70%
4.05	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI	Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	25%
5.	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
5.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	92%
5.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	95%
		Persentase penyelenggaraan tribumtrans	75%
		Persentase cakupan perlindungan masyarakat	70%
5.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	92%
5.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	30%
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	65%
		Persentase penanganan pasca-bencana	60%
5.04	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	35%
6.	URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL		
6.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	85%
6.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pekerja sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	55%

6.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pekerja sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi bagi PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	55%
		Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	30%
		Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial	20%
		Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial	10%
6.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulihan	100%
		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100%
6.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	65%
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	65%
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	65%
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60%
		Persentase PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	40%
		Indeks kesejahteraan sosial penyandang disabilitas	0,45
		Indeks kesejahteraan sosial lanjut usia	0,50

		Indeks peranan sosial	0,55
6.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	50%
		Persentase penerima manfaat yang meningkatkan kemandirian ekonomi	35%
		Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	70%
		Peningkatan indeks kebutuhan dasar	0,60
		Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi	0,55
		Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	10%
6.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam, sosial, dan/atau nonalam yang terpenuhi pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	70%
		Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya	60%
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	100%
6.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	60%
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
7.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
7.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kecamatan yang menyusun rencana tenaga kerja	60%
7.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkatkan produktivitasnya	70%
7.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	750 orang

7.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	1.200 orang
8.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
8.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	90%
8.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	25%
8.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	55%
8.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan	85%
8.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	70%
8.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan	65%
8.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	0,70
8.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	75%
		Indeks perlindungan khusus anak (IPKA)	0,72
9.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
9.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase jumlah cadangan pangan	45%
9.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor pola pangan harapan	85
9.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	10%

9.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	60%
9.06	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	70%
10. URUSAN PERTANAHAN			
10.02	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu	60%
10.03	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	45%
10.04	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	70%
10.05	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	50%
10.06	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase tanah ulayat yang ditetapkan	40%
10.07	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lokasi	65%
10.08	PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH	Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah	100%
10.09	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase kejelasan hak milik atas tanah	85%
10.10	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	Persentase SDM bidang pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	75%
10.11	PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT, DAN PULAU	Persentase pertanian di wilayah pesisir, laut, dan pulau yang tertata	55%
10.12	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Persentase informasi pertanian yang dimanfaatkan	70%

10.13	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA, DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan	40%
11.	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	80%
11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi lingkungan hidup yang ditindaklanjuti kajian	65%
11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air	60
		Indeks kualitas udara	94
11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	18%
11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3	Persentase limbah B3 yang dikelola	55%
11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH	75%
11.07	PROGRAM PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	60%
11.08	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase partisipasi masyarakat dalam PPLH	30%
11.09	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian kasus/sengketa tindak pidana lingkungan hidup	25%
11.10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks kinerja pengelolaan sampah	70%
11.11	PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN MHA TERKAIT PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	40%
12.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		

12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	90%
12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	70%
		Persentase kepemilikan kartu identitas anak	75%
12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	90%
		Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	99%
		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	85%
		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	70%
12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	85%
12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100%
13.	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	100%
13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase fasilitas penataan desa	40%
13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan kerjasama desa	40%
13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	50%
13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitas tata kelola desa	55%
13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase fasilitas pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	55%
13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase fasilitas pemberdayaan lembaga adat desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	50%

14.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran total (TFR)	2,0
		Angka kelahiran remaja umur 15–19 tahun	3,0
14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern	65%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	8%
14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	70%
15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	85%
15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas darat	3%
		Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	25%
15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas laut	5%
15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase pengendalian KKOP	60%
16.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	90%
16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	80%
16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	3,2
17.	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		

17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan volume usaha koperasi	15
17.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	40%
17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif	55%
17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	45%
17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	50%
17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	60%
		Pertumbuhan wirausaha	25%
17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	30%
17.09	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	Persentase koperasi yang memiliki izin simpan pinjam	35%
18.	URUSAN PENANAMAN MODAL		
18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	90%
18.02	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi total terhadap target investasi	70%
18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	45%
18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	85%
18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	60%
18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase kerja sama penanaman modal yang ditindaklanjuti	40%
19.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		

19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	85%
19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio wirausaha pemuda	0,08
19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang masuk pelatnas	0,05%
19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	60%
20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,2
21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
21.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	40%
21.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	35%
21.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah local	30%
21.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	50%
		Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	20%
21.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	45%
21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penyelenggaraan persandian	85%
22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	85%

22.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	55
22.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	60%
22.04	PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN	Persentase pustakawan yang memperoleh sertifikasi profesi di bidang perpustakaan	40%
23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
23.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip	65
23.03	PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	70%
23.04	PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	45%
23.05	AKREDITASI DAN SERTIFIKASI	Persentase SDM bidang kearsipan yang ditingkatkan kompetensinya	40%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	85%
24.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	14%
24.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	15%
24.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	13%
24.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan kawasan konservasi	60%
24.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi ikan	65%
25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			

25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	90%
25.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	5%
25.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata	4%
25.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	3%
25.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	6%
26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	85%
26.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi tanaman pangan	8%
		Peningkatan produksi hortikultura	7%
		Peningkatan produksi komoditas peternakan	6%
26.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan luas lahan yang ditetapkan menjadi LP2B	70%
26.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PMHS)	75%
		Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat NKV	60%
26.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan bencana pertanian	70%
		Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	60%
26.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	85%

26.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok dan SDM penyuluh pertanian	75%
		Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	60%
27.	URUSAN PERDAGANGAN		
27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	90%
27.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	75%
27.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	60%
27.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	85%
27.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor barang	10%
27.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen	70%
27.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	80%
28.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	85%
28.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	70%
28.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	60%
28.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	75%
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	90%

4.01.2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks kematangan organisasi	Level 3
4.01.3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Efektivitas kerja sama daerah	75%
		Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	80%
4.01.4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	80%
4.01.5	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum yang dihasilkan	85%
4.01.6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan Pembangunan	80%
4.01.7	PROGRAM KEBIJAKAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan UKPBJ	Level 3
4.01.8	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan	80%
4.02	SEKRETARIAT DPRD		
4.02.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	90%
4.02.2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N	100%
		Persentase penetapan Ranperda tahun N	85%
		Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	90%
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN		
5.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	90%
5.01.2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	95%
		Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	90%

5.01.3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	90%
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	92%
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang perekonomian dan SDA	90%
5.02 KEUANGAN			
5.02.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	90%
5.02.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	90%
		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan public	45%
		Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	98%
		Persentase penurunan SILPA	0,10%
		Persentase laporan keuangan tepat waktu	100%
5.02.3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penambahan nilai aset tetap	6%
5.02.4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	12%
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	85%
		Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	90%
5.03 KEPEGAWAIAN			
5.03.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	90%
5.03.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	85%